

## Kesiapan Digitalisasi Akuntansi Koperasi dalam Menerapkan SAK Entitas Privat

**Eka Setiajatnika<sup>1</sup>, Udin Hidayat<sup>2</sup>**  
**Universitas Koperasi Indonesia<sup>1,2</sup>**  
[ekasetiajatnika@ikopin.ac.id](mailto:ekasetiajatnika@ikopin.ac.id)  
[tigaputu7@gmail.com](mailto:tigaputu7@gmail.com)

---

### Info Artikel

Sejarah Artikel:  
Diterima 20 Desember 2025  
Disetujui 20 Januari 2026  
Diterbitkan 02 Februari 2026

---

**Keywords:** *Accounting Digitalization; Cooperatives; Financial Accounting Standards for Private Entities (SAK EP); Accounting Information Systems; Financial Governance.*

---

### ABSTRACT

*The adoption of the Financial Accounting Standards for Private Entities (SAK EP) by cooperatives after the issuance of the Regulation of the Minister of Cooperatives Number 2 of 2025 demands more than mere normative adherence, as it also requires sufficient operational preparedness. This study seeks to conceptually analyze the readiness of accounting digitalization within cooperatives in supporting the implementation of SAK EP. Employing a qualitative approach with a literature-based research design, the study examines accounting standards, regulatory provisions, and relevant scholarly literature. The analysis reveals that accounting digitalization readiness in cooperatives constitutes a multidimensional framework comprising technological readiness, human resource capabilities, organizational support, and regulatory alignment. Collectively, these dimensions shape the capacity of cooperatives to implement SAK EP in a consistent and sustainable manner. From a conceptual perspective, accounting digitalization plays a strategic role in enhancing the quality of cooperative financial reporting, particularly with respect to accuracy, timeliness, and information traceability. This study enriches the literature on cooperative accounting and offers policy-oriented insights for strengthening financial governance in cooperatives.*

---

## PENDAHULUAN

Koperasi merupakan entitas ekonomi berbasis keanggotaan yang memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi dan penguatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Meskipun jumlah koperasi aktif masih relatif besar, berbagai kajian menunjukkan bahwa kualitas tata kelola keuangan koperasi belum sepenuhnya optimal. Permasalahan utama yang sering diidentifikasi meliputi rendahnya tingkat transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Suhartanto dan Leo (2018) menegaskan bahwa lemahnya penerapan standar akuntansi pada koperasi berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan, yang pada akhirnya memengaruhi kepercayaan anggota dan pemangku kepentingan. Sejalan dengan itu, Mardiasmo (2018) menekankan bahwa akuntabilitas keuangan merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan organisasi berbasis kolektivitas, termasuk koperasi.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan koperasi, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 yang mewajibkan penerapan Standar Akuntansi

Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Penerapan SAK Entitas Privat menandai perubahan penting dalam praktik akuntansi koperasi, karena standar ini menuntut penyajian informasi keuangan yang lebih sistematis, andal, dan relevan. Namun demikian, keberhasilan implementasi standar akuntansi tidak hanya ditentukan oleh pemahaman terhadap ketentuan normatif, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan sistem pendukung yang digunakan dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan.

Dalam konteks tersebut, sistem informasi akuntansi dan digitalisasi pencatatan keuangan menjadi faktor kunci. Romney dan Steinbart (2021) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berbasis digital mampu meningkatkan keakuratan data, ketepatan waktu pelaporan, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi. Susanto (2017) juga menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi akuntansi berkontribusi positif terhadap kinerja organisasi dan mutu informasi keuangan. Akan tetapi, kondisi empiris pada koperasi menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi masih mengandalkan pencatatan manual atau semi-manual, sehingga menyulitkan penerapan standar akuntansi secara konsisten dan berkelanjutan (Sari & Wahyuni, 2020).

Lebih lanjut, digitalisasi akuntansi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penggunaan aplikasi akuntansi, melainkan sebagai bagian dari proses transformasi digital organisasi. Vial (2019) menjelaskan bahwa transformasi digital mencakup perubahan struktural, kultural, dan operasional yang didorong oleh pemanfaatan teknologi informasi. Dalam konteks koperasi, proses ini sering kali terhambat oleh keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, rendahnya literasi digital pengurus, serta minimnya dukungan kebijakan internal organisasi. Nurhayati dan Haryanto (2021) menegaskan bahwa tingkat kesiapan digital koperasi masih relatif rendah, sehingga memerlukan pendekatan strategis yang lebih komprehensif untuk mendukung reformasi praktik akuntansi.

Di sisi lain, kajian akademik menunjukkan bahwa penelitian mengenai penerapan standar akuntansi koperasi dan digitalisasi akuntansi masih cenderung terpisah. Penelitian tentang standar akuntansi koperasi umumnya berfokus pada aspek kepatuhan dan kualitas laporan keuangan, sementara kajian digitalisasi akuntansi lebih banyak diarahkan pada perusahaan atau UMKM non-koperasi. Kajian yang secara eksplisit mengintegrasikan kesiapan digitalisasi akuntansi koperasi sebagai prasyarat penerapan SAK Entitas Privat, khususnya dalam konteks implementasi Permenkop Nomor 2 Tahun 2025, masih terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memandang penting untuk mengkaji kesiapan digitalisasi akuntansi koperasi dalam mendukung penerapan SAK Entitas Privat melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan literatur akuntansi koperasi serta menjadi rujukan kebijakan dalam penguatan tata kelola keuangan koperasi di Indonesia.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1. Koperasi dan Tata Kelola Keuangan**

Koperasi sebagai badan usaha yang dibangun atas dasar keanggotaan dan nilai kolektivitas menempatkan tata kelola keuangan sebagai aspek fundamental dalam menjaga keberlanjutan organisasi dan kepercayaan anggota. Tata kelola keuangan yang efektif tercermin melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi yang berlaku. Mardiasmo (2018) menekankan bahwa dalam organisasi yang bersifat partisipatif, akuntabilitas keuangan memiliki peran strategis karena laporan keuangan menjadi sarana utama pertanggungjawaban pengurus kepada anggota. Oleh karena itu, dalam konteks koperasi, mutu tata

kelola keuangan sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal, relevan, dan disusun secara tepat waktu.

## **2.2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) pada Koperasi**

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) merupakan standar yang dirancang bagi entitas non-publik, termasuk koperasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025. Standar ini menekankan prinsip-prinsip dasar akuntansi—meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan—dengan pendekatan yang lebih sederhana dibandingkan standar untuk entitas publik, namun tetap menjaga kualitas dan kegunaan informasi keuangan. Penerapan SAK EP pada koperasi bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan, keandalan, dan relevansi laporan keuangan agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anggota dan pemangku kepentingan. Meski demikian, efektivitas penerapan standar ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang dimiliki koperasi.

## **2.3. Sistem Informasi Akuntansi dan Digitalisasi Akuntansi**

Sistem informasi akuntansi dapat dipahami sebagai rangkaian prosedur, teknologi, dan sumber daya yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, serta menyajikan informasi keuangan. Romney dan Steinbart (2021) menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi yang terintegrasi secara digital mampu meningkatkan akurasi data, efisiensi operasional, serta ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan. Digitalisasi akuntansi memungkinkan pencatatan transaksi dilakukan secara otomatis dan terstandarisasi, sehingga meminimalkan kesalahan manusia sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi. Bagi koperasi, penerapan sistem informasi akuntansi berbasis digital menjadi elemen fundamental dalam mendukung implementasi SAK Entitas Privat secara konsisten dan berkelanjutan.

## **2.4. Transformasi Digital dalam Organisasi Koperasi**

Transformasi digital merupakan proses perubahan menyeluruh dalam organisasi yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas operasional. Menurut Vial (2019), transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan adopsi teknologi, tetapi juga mencakup perubahan struktur organisasi, budaya kerja, dan proses operasional. Dalam praktiknya, koperasi sering menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan transformasi digital, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, rendahnya literasi digital pengurus, serta kurangnya dukungan kebijakan internal. Kondisi tersebut menyebabkan digitalisasi akuntansi di koperasi kerap berlangsung secara parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan tuntutan penerapan standar akuntansi yang baru.

## **2.5. Kesiapan Digitalisasi Akuntansi Koperasi**

Kesiapan digitalisasi akuntansi merujuk pada kemampuan koperasi dalam mengadopsi dan memanfaatkan sistem akuntansi berbasis digital secara optimal. Kesiapan ini mencakup beberapa dimensi utama, antara lain kesiapan teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dukungan organisasi, serta kesesuaian dengan ketentuan regulasi. Nurhayati dan Haryanto (2021) menyatakan bahwa rendahnya tingkat kesiapan digital koperasi menjadi salah satu kendala utama dalam upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Dengan demikian, kesiapan digitalisasi akuntansi perlu dipandang sebagai prasyarat strategis dalam mendukung penerapan SAK Entitas Privat pada koperasi.

## 2.6. Sintesis Kajian Pustaka dan Posisi Penelitian

Berdasarkan telaah literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi SAK Entitas Privat pada koperasi menuntut dukungan sistem akuntansi yang andal dan terintegrasi secara digital. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu masih membahas standar akuntansi dan digitalisasi akuntansi secara terpisah. Penelitian ini memposisikan diri sebagai kajian konseptual yang mengintegrasikan kedua perspektif tersebut dengan menempatkan kesiapan digitalisasi akuntansi koperasi sebagai faktor kunci keberhasilan penerapan SAK Entitas Privat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur akuntansi koperasi serta menjadi dasar konseptual bagi perumusan kebijakan dan pengembangan praktik digitalisasi akuntansi koperasi di Indonesia.

**Tabel 1. Sintesis Literatur Terkait**

No	Penulis & Tahun	Fokus Penelitian	Konteks/Objek	Temuan Utama	Relevansi & Celah Penelitian
1	Suhartanto & Leo (2018)	Penerapan standar akuntansi	Koperasi	Penerapan standar akuntansi berpengaruh pada kualitas laporan keuangan	Belum mengaitkan dengan digitalisasi akuntansi
2	Mardiasmo (2018)	Akuntabilitas keuangan	Organisasi publik & koperasi	Akuntabilitas keuangan penting bagi keberlanjutan organisasi	Belum membahas kesiapan sistem dan teknologi
3	Susanto (2017)	Sistem informasi akuntansi	Organisasi bisnis	Kualitas SIA meningkatkan kinerja & kualitas informasi	Fokus non-koperasi
4	Romney & Steinbart (2021)	Accounting Information System	Organisasi modern	SIA digital meningkatkan akurasi & kepatuhan standar	Bersifat konseptual umum
5	Vial (2019)	Transformasi digital	Berbagai sektor	Transformasi digital mencakup aspek teknologi, struktur, dan budaya	Tidak spesifik pada koperasi & akuntansi
6	Sari & Wahyuni (2020)	SIA & laporan keuangan	UMKM & koperasi	Banyak koperasi masih manual/semi-manual	Belum dikaitkan dengan standar akuntansi terbaru
7	Nurhayati & Haryanto (2021)	Digital readiness koperasi	Koperasi	Kesiapan digital koperasi masih rendah	Belum dikaitkan dengan SAK EP

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan desain **studi pustaka (*literature-based research*)**. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual kesiapan digitalisasi akuntansi koperasi dalam mendukung penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) tanpa melakukan pengujian hipotesis statistik.

Metode penelitian dilakukan melalui telaah sistematis terhadap literatur akademik dan regulasi yang relevan, khususnya pasca pemberlakuan Permenkop Nomor 2 Tahun 2025. Data yang digunakan merupakan data sekunder, meliputi standar dan peraturan akuntansi, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi (SINTA/Scopus), buku teks sistem informasi akuntansi, serta dokumen kebijakan terkait koperasi dan transformasi digital.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dengan kata kunci yang relevan, seleksi berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber, serta pengelompokan tematik. Analisis data dilakukan menggunakan content analysis dan thematic analysis, disertai analisis komparatif antar-literatur dan regulasi. Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan konsistensi sintesis literatur. Penelitian ini bersifat konseptual dan tidak dimaksudkan untuk generalisasi empiris.

## **PEMBAHASAN KONSEPTUAL**

Sejalan dengan literatur transformasi digital (Vial, 2019; Granlund & Malmi, 2020), kesiapan digitalisasi akuntansi pada koperasi perlu dipahami sebagai proses berkelanjutan yang tidak hanya melibatkan adopsi teknologi, tetapi juga perubahan organisasi dan praktik pelaporan keuangan dalam rangka mendukung penerapan standar akuntansi secara konsisten.

### **4.1 Kesiapan Digitalisasi Akuntansi sebagai Prasyarat Implementasi SAK Entitas Privat**

Literatur standar akuntansi memposisikan standar sebagai kerangka normatif yang mengarahkan proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan. Namun, sejumlah studi menegaskan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan sistem dan proses operasional organisasi yang mendukungnya (Granlund & Malmi, 2020; Romney & Steinbart, 2021). Dalam konteks koperasi, implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) pasca diterbitkannya Permenkop Nomor 2 Tahun 2025 menuntut kesiapan yang melampaui aspek kepatuhan administratif semata.

Digitalisasi akuntansi dapat dipahami sebagai prasyarat struktural yang memungkinkan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dioperasionalkan secara konsisten dalam praktik pelaporan keuangan koperasi. Keberadaan sistem akuntansi berbasis digital menyediakan kerangka operasional yang mendukung penerjemahan prinsip-prinsip SAK EP ke dalam proses pencatatan dan pelaporan yang terstandarisasi. Sebaliknya, koperasi yang masih bergantung pada sistem pencatatan manual atau semi-manual cenderung menghadapi risiko penerapan standar yang bersifat parsial dan tidak berkelanjutan, terutama dalam aspek ketepatan waktu, konsistensi, dan keterlacakan informasi keuangan.

Temuan empiris Suhartanto dan Leo (2018) menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem pencatatan akuntansi berimplikasi langsung terhadap rendahnya kualitas laporan keuangan koperasi, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas tata kelola keuangan. Sejalan dengan itu, Granlund dan Malmi (2020) menegaskan bahwa sistem akuntansi berbasis digital berperan sebagai mekanisme pengendalian yang mengintegrasikan standar akuntansi ke dalam rutinitas organisasi, sehingga meningkatkan konsistensi dan kualitas pelaporan keuangan. Dari perspektif konseptual, kondisi ini menegaskan bahwa kesiapan digitalisasi akuntansi tidak sekadar berfungsi sebagai perangkat teknis, tetapi sebagai mekanisme kunci yang menjembatani tuntutan normatif standar akuntansi dengan praktik pelaporan keuangan koperasi. Dengan demikian, digitalisasi akuntansi memastikan bahwa penerapan SAK EP tidak berhenti pada kepatuhan formal, melainkan terwujud dalam kualitas informasi keuangan yang andal dan relevan..

### **4.2 Dimensi Kesiapan Digitalisasi Akuntansi Koperasi**

Literatur di bidang sistem informasi akuntansi dan transformasi digital menunjukkan bahwa kesiapan digitalisasi akuntansi tidak dapat dipahami sebagai kondisi tunggal, melainkan sebagai konstruksi multidimensional yang terbentuk dari interaksi antara kesiapan teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dukungan organisasi, dan kesiapan regulatif (Susanto, 2017; Nurhayati & Haryanto, 2021).

Dari perspektif sistem, keempat dimensi tersebut membentuk satu kesatuan mekanisme yang secara kolektif menentukan sejauh mana standar akuntansi dapat diinternalisasi dan dioperasionalkan dalam praktik organisasi.

Kesiapan teknologi menyediakan infrastruktur dasar yang memungkinkan otomatisasi, integrasi data, dan standarisasi proses akuntansi. Namun demikian, keberadaan teknologi semata tidak menjamin efektivitas penerapan digitalisasi akuntansi. Literatur menegaskan bahwa pemanfaatan sistem akuntansi berbasis digital sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam memahami standar akuntansi dan mengoperasikan sistem informasi secara tepat. Granlund dan Malmi (2020) menunjukkan bahwa digitalisasi akuntansi tidak akan menghasilkan dampak yang signifikan apabila tidak disertai dengan perubahan pada struktur organisasi, pembagian peran, serta rutinitas kerja yang mendukung pemanfaatan teknologi secara berkelanjutan.

Selain aspek teknologi dan sumber daya manusia, dukungan organisasi dan kesiapan regulatif berperan penting dalam memastikan bahwa digitalisasi akuntansi terintegrasi ke dalam sistem tata kelola keuangan koperasi. Dukungan organisasi tercermin dalam komitmen manajerial, kebijakan internal, dan prosedur operasional yang selaras dengan penerapan standar akuntansi. Sementara itu, kesiapan regulatif memastikan bahwa ketentuan SAK Entitas Privat (SAK EP) dipahami dan diinternalisasi dalam praktik akuntansi sehari-hari. Secara konseptual, kegagalan pada salah satu dimensi kesiapan berpotensi melemahkan keseluruhan mekanisme penerapan SAK EP. Oleh karena itu, kesiapan digitalisasi akuntansi perlu dipahami sebagai suatu sistem yang bersifat saling bergantung antar komponennya, bukan sebagai sekumpulan inisiatif teknis yang berdiri sendiri.

#### **4.3 Digitalisasi Akuntansi dan Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Koperasi**

Dari perspektif teori sistem informasi akuntansi, digitalisasi akuntansi dipahami sebagai mekanisme yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan melalui integrasi data transaksi, otomatisasi proses pencatatan, serta penguatan pengendalian internal berbasis sistem. Literatur menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi berbasis digital memungkinkan informasi keuangan diproses secara lebih konsisten dan terstandarisasi, sehingga berkontribusi pada peningkatan akurasi, ketepatan waktu, dan keterlacakan informasi keuangan (Romney & Steinbart, 2021; Appelbaum et al., 2017).

Dalam konteks penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), mekanisme tersebut menjadi semakin relevan karena standar akuntansi menuntut konsistensi dalam perlakuan akuntansi dan keandalan informasi yang disajikan. Digitalisasi akuntansi memungkinkan ketentuan SAK EP dioperasionalkan secara lebih efektif, mengingat proses pencatatan dan pelaporan keuangan didukung oleh sistem yang terstruktur dan terintegrasi. Temuan Suhartanto dan Leo (2018) menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem pencatatan akuntansi berimplikasi langsung pada rendahnya kualitas laporan keuangan koperasi. Sebaliknya, penerapan sistem akuntansi digital memperkuat keterkaitan antara standar akuntansi dan praktik pelaporan, sehingga mendorong peningkatan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan.

Secara konseptual, hubungan antara digitalisasi akuntansi dan kualitas pelaporan keuangan koperasi dapat dijelaskan melalui mekanisme sistemik yang saling terkait. Standar akuntansi menyediakan kerangka normatif yang mengatur praktik pelaporan, sementara sistem akuntansi berbasis digital berfungsi untuk mengoperasionalkan ketentuan tersebut ke dalam proses organisasi. Hasil dari mekanisme ini tercermin pada meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan koperasi. Dengan demikian, digitalisasi akuntansi tidak hanya berperan sebagai instrumen pendukung penerapan standar, tetapi merupakan komponen inti dalam penguatan tata kelola keuangan koperasi secara berkelanjutan.

#### **4.4 Tantangan Implementasi Digitalisasi Akuntansi pada Koperasi**

Meskipun berbagai kajian menegaskan peran strategis digitalisasi akuntansi dalam mendukung penerapan standar akuntansi, implementasinya pada koperasi masih menghadapi sejumlah kendala yang bersifat sistemik. Dalam perspektif transformasi digital, tantangan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan teknologi, melainkan oleh interaksi yang kompleks antara faktor organisasi, kapasitas sumber daya manusia, dan konteks regulatif yang melingkupinya (Vial, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi akuntansi merupakan proses perubahan organisasi yang komprehensif, sehingga tidak dapat direduksi hanya sebagai kegiatan adopsi perangkat lunak akuntansi.

Secara operasional, keterbatasan sumber daya finansial memang kerap menjadi hambatan awal bagi koperasi dalam mengembangkan sistem informasi akuntansi yang memadai. Namun, literatur menegaskan bahwa tantangan yang lebih mendasar justru terletak pada aspek non-teknis, seperti resistensi terhadap perubahan, rendahnya literasi digital pengelola, serta belum terintegrasinya digitalisasi akuntansi ke dalam strategi dan kebijakan organisasi. Granlund dan Malmi (2020) menunjukkan bahwa kegagalan transformasi digital akuntansi sering kali terjadi ketika implementasi teknologi tidak diikuti dengan penyesuaian struktur organisasi, pembagian peran, dan rutinitas kerja yang mendukung pemanfaatan sistem secara berkelanjutan.

Dalam konteks penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), tantangan-tantangan tersebut berpotensi melemahkan mekanisme yang menghubungkan ketentuan standar akuntansi dengan praktik pelaporan keuangan koperasi. Digitalisasi yang dilakukan secara parsial dan bersifat reaktif terhadap tuntutan regulasi cenderung menghasilkan penerapan SAK EP yang tidak konsisten dan sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, secara konseptual, tantangan implementasi digitalisasi akuntansi pada koperasi perlu dipahami sebagai bentuk kegagalan sistemik dalam menyelaraskan dimensi teknologi, sumber daya manusia, organisasi, dan regulasi dalam satu kerangka tata kelola keuangan yang terpadu.

#### **4.5 Implikasi Konseptual bagi Pengembangan Akuntansi Koperasi**

Pembahasan konseptual pada subbab-subbab sebelumnya menghasilkan sejumlah implikasi penting bagi pengembangan literatur akuntansi koperasi. Pertama, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pada koperasi tidak dapat dipahami secara terpisah dari kesiapan digitalisasi akuntansi sebagai suatu sistem yang terintegrasi. Dalam kerangka ini, standar akuntansi tidak hanya berperan sebagai perangkat normatif yang mengatur pelaporan keuangan, tetapi juga menjadi bagian dari praktik organisasi yang dimediasi oleh sistem informasi akuntansi dalam aktivitas operasional sehari-hari.

Kedua, dengan mengintegrasikan perspektif teori standar akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan transformasi digital, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berupa pengembangan kerangka konseptual yang menjelaskan mekanisme *how and why* digitalisasi akuntansi memengaruhi kualitas penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Kerangka tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi akuntansi berfungsi sebagai mekanisme mediasi yang menghubungkan ketentuan regulatif akuntansi dengan praktik pelaporan keuangan koperasi, sehingga memungkinkan standar akuntansi diimplementasikan secara lebih konsisten dan berkelanjutan.

Ketiga, secara konseptual, temuan penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan studi empiris lanjutan yang dapat menguji secara lebih sistematis hubungan antara dimensi kesiapan digitalisasi akuntansi dan kualitas pelaporan keuangan koperasi. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah literatur akuntansi koperasi, tetapi juga menyediakan landasan

teoretis yang relevan bagi perumusan kebijakan dan pengembangan praktik digitalisasi akuntansi koperasi di Indonesia.

## **SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN**

### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan konseptual pada Bab IV, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) pada koperasi sangat bergantung pada kesiapan digitalisasi akuntansi sebagai suatu sistem yang terintegrasi. Penerapan standar akuntansi tidak dapat dipahami semata sebagai pemenuhan kewajiban regulatif, melainkan ditentukan oleh kemampuan koperasi dalam menerjemahkan ketentuan standar ke dalam praktik pencatatan dan pelaporan keuangan operasional sehari-hari.

Kajian ini menunjukkan bahwa kesiapan digitalisasi akuntansi bersifat multidimensional, mencakup kesiapan teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dukungan organisasi, serta kesiapan regulatif. Keempat dimensi tersebut saling berinteraksi dan secara kolektif membentuk mekanisme yang menentukan tingkat konsistensi, keandalan, dan keberlanjutan penerapan SAK EP. Kelemahan pada salah satu dimensi berpotensi menghambat efektivitas keseluruhan proses implementasi standar akuntansi.

Secara konseptual, digitalisasi akuntansi juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan koperasi, khususnya dari aspek akurasi, ketepatan waktu, dan keterlacakan informasi. Melalui integrasi data, otomatisasi proses, serta penguatan pengendalian internal, sistem akuntansi berbasis digital memungkinkan ketentuan standar akuntansi diterapkan secara lebih efektif. Dengan demikian, digitalisasi akuntansi tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap SAK EP, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan koperasi.

Namun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi digitalisasi akuntansi pada koperasi masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat sistemik. Tantangan tersebut tidak hanya terkait dengan keterbatasan teknologi dan sumber daya finansial, tetapi juga mencakup aspek non-teknis, seperti resistensi terhadap perubahan, rendahnya literasi digital, serta belum terintegrasinya digitalisasi akuntansi ke dalam strategi organisasi. Kondisi ini berpotensi menyebabkan penerapan SAK EP berlangsung secara parsial dan kurang berkelanjutan apabila tidak dikelola secara terencana dan sistematis.

### **5.2. Implikasi Kebijakan**

Berdasarkan simpulan yang diperoleh, penelitian ini menghasilkan sejumlah implikasi kebijakan yang relevan bagi penguatan praktik akuntansi koperasi di Indonesia.

Pertama, bagi regulator dan perumus kebijakan, penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) perlu didukung oleh kebijakan komplementer yang mendorong percepatan digitalisasi akuntansi koperasi. Regulasi tidak cukup berhenti pada penetapan ketentuan normatif, tetapi perlu dilengkapi dengan pedoman implementasi teknis, program pendampingan yang berkelanjutan, serta upaya penguatan kapasitas koperasi, khususnya dalam pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi.

Kedua, bagi gerakan koperasi dan pengurus koperasi, digitalisasi akuntansi perlu ditempatkan sebagai agenda strategis organisasi, bukan semata-mata sebagai respons terhadap tuntutan regulasi. Investasi pada sistem informasi akuntansi, peningkatan kompetensi akuntansi dan literasi digital pengelola, serta penyusunan prosedur operasional standar yang selaras dengan ketentuan SAK EP

merupakan langkah penting untuk menjamin keberlanjutan penerapan standar akuntansi sekaligus memperkuat tata kelola keuangan koperasi.

Ketiga, bagi akademisi dan peneliti, temuan konseptual penelitian ini membuka peluang bagi pengembangan studi empiris lanjutan yang menguji secara kuantitatif hubungan antara tingkat kesiapan digitalisasi akuntansi dan kualitas penerapan SAK EP pada koperasi. Selain itu, penelitian lintas disiplin yang mengintegrasikan perspektif akuntansi, sistem informasi, dan tata kelola koperasi menjadi agenda riset yang relevan untuk memperkaya pengembangan literatur akuntansi koperasi di masa mendatang.

Secara keseluruhan, penguatan kesiapan digitalisasi akuntansi merupakan faktor kunci dalam menjembatani tuntutan regulasi akuntansi dengan praktik pelaporan keuangan koperasi. Oleh karena itu, implementasi SAK Entitas Privat perlu diposisikan dalam kerangka transformasi digital akuntansi yang dirancang secara terencana, sistematis, dan berorientasi pada keberlanjutan.

## **BIBLIOGRAFI**

- Appelbaum, D., Kogan, A., Vasarhelyi, M. A., & Yan, Z. (2017). Impact of business analytics and enterprise systems on managerial accounting. *International Journal of Accounting Information Systems*, 25, 29–44. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2017.03.003>
- Granlund, M., & Malmi, T. (2020). Management control and digitalisation: A review and research agenda. *Accounting, Organizations and Society*, 86, 101116. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2020.101116>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Standar akuntansi keuangan entitas privat (SAK EP)*. Jakarta: IAI.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat pada koperasi*. Jakarta: Kemenkop UKM RI.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik (Edisi terbaru)*. Yogyakarta: Andi.
- Nurhayati, S., & Haryanto. (2021). Kesiapan digitalisasi akuntansi dan implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan koperasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 11(2), 245–260. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i2.XXXXX>
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2021). *Accounting information systems (15th ed.)*. Harlow, UK: Pearson Education.
- Sari, D. P., & Wahyuni, S. (2020). Implementasi sistem informasi akuntansi pada koperasi dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 17(1), 67–82. <https://doi.org/10.21002/jaki.2020.04>
- Suhartanto, D., & Leo, G. (2018). Kualitas laporan keuangan koperasi dan faktor-faktor yang memengaruhinya. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 301–315. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9018>

- Susanto, A. (2017). The influence of accounting information system quality on accounting information quality and its impact on good governance. *Journal of Applied Accounting Research*, 18(3), 339–359. <https://doi.org/10.1108/JAAR-04-2016-0042>
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>